

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 12, Halaman 538-542
Licensed by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10447553)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10447553>

Pemikiran Hukum Islam K.H. Abdurrahman Wahid : Agama dan Negara, Pluralisme, Demokratisasi, dan Pribumisasi

Muh.Awaluddin Kadir¹, Fatmawati², Lomba Sultan³

^{1,2,3}Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: Muhammadibnukadir@gmail.com

Abstrak

Sosok Abdurrahman Wahid merupakan sosok yang unik dan pemikirannya tergolong tipikal. Bagi kebanyakan orang, beliau dikategorikan sebagai non- tradisional konservatif, bukan pula modernis Islam. Akan tetapi, dia seorang pemikir Muslim, seorang pemimpin organisasi Islam berbasis tradisi, dan seorang cendekiawan inovatif yang melahirkan banyak karya intelektual; di antaranya: pemikiran mengenai hubungan agama dan Negara, pluralisme, demokratisasi dan pribumisasi.

Kata kunci: *Agama, liberalisme, pluralisme, demokratisasi dan pribumisasi.*

Article Info

Received date: 30 November 2023

Revised date: 12 December 2023

Accepted date: 25 December 2023

PENDAHULUAN

Peristiwa yang sangat cemerlang dan mengagetkan dalam dunia publik pada dekade 1970-an hingga saat ini, yang berlatar belakang keagamaan, namun merefleksikan sosial, politik, budaya dan pembaharuan lainnya. Dan lebih mengagetkan lagi pada Oktober 1999, Abdurrahman Wahid alias Gusdur, seorang pemimpin Islam terkemuka, menjadi presiden pertama dalam sejarah Indonesia. Sejak ia terpilih sebagai Ketua Umum PB-NU pada tahun 1984 dinilai telah berdiri di garda depan dengan membawa pergulatan pemikiran keagamaan yang telah melompat pada epistemologi baru (Wahid, 1999), khususnya pada tarik-menarik antara Islam sebagai agama di satu pihak dan konstelasi politik penyelenggaraan negara di pihak lain.

Sosok Abdurrahman Wahid benar-benar sebuah teka-teki. Dia bukan tradisional konservatif, bukan pula modernis Islam. Dia seorang pemikir liberal, seorang pemimpin organisasi Islam berbasis tradisi terbesar. Dia seorang cendekiawan inovatif yang memeragakan profesional intelektual (Esposito, 2002). Ia adalah seorang intelektual/aktivis dan beberapa kalangan menuduhnya terlalu dekat dengan pemerintah, tetapi pejabat pemerintah justru takut akan pengaruh dan campur tangannya (Elposito, 2002). Sebagai pemimpin organisasi Islam terbesar di Indonesia, Gusdur menentang reformis Islam yang hendak mengukuhkan kembali peran Islam dalam politik, bahkan Gusdur menunjukkan sikapnya pada visi politik Indonesia yang demokratis, sekuler, dan nasionalis (Remage, 1997). Untuk lebih memahami sosok sebenarnya Gusdur dan bagaimana ijtihadnya, maka tulisan ini akan memaparkan biografi singkatnya, dan mencoba pula memaparkan pokok-pokok pemikirannya antara lain: konsepnya tentang hubungan Islam dan Negara, Pluralisme, Demokratisasi, dan Pribumisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi K.H. Abdurrahman Wahid

K.H. Abdurrahman Wahid dilahirkan pada 4 Agustus 1940 di Denanyar Jombang Jawa Timur sebuah daerah berbasis NU. Ia diberi gelar Gusdur karena ia berlatar keluarga agamawan dalam budaya Jawa diberi gelar Gus yang berarti anak atau keturunan Kiyai. Lalu ditambah sepotong dari namanya lalu menjadilah Gusdur. Beliau keturunan NU Tulen. Di samping ayahnya yang mantan Menteri Agama RI KH. Wahid Hasyim pada masa Soekarno, juga dari pihak ibunya Hajjah Shalehah berayahkan tokoh dan Pendiri NU, K.H. Bisri Syamsuri. Sejak muda Gusdur terkenal cerdas, humoris, luwes bergaul dan sikapnya yang terbuka. Gusdur menyelesaikan sekolah dasarnya di Jakarta. Kemudian Gusdur dikirim oleh ayahnya untuk mengikuti privat bahasa Belanda kepada

Williem Bohl, Seorang yang berkebangsaan Jerman yang telah masuk Islam dan memperkenalkan musik-musik klasik, Barat dan Eropa. Sambil Privat ia melanjutkan sekolahnya di SMEP (Sekolah Menengah Ekonomi Pertama) di Jakarta. Setahun kemudian, dia pindah ke Yogyakarta dan nyantri di pesantren Krapyak yang diasuh KH. Ali Ma'sum hingga tamat 1957 (Ngatawi, 1997). Ia belajar di empat pesantren di antaranya pesantren Tegal Rejo di Magelang, dan Tambak Beras. Gusdur ketika itu berumur 20 tahun dan telah menjadi seorang Kiyai muda yang mengajar santri yuniornya termasuk Sinta Nuriyah, yang diperistrikan di kemudian hari. Pendidikan formalnya ditunjang dengan pajaran berbagai aliran budaya dan pemikiran. Dia kuliah di Universitas Al-Azhar (1964-1966) dan Fakultas Seni Univesitas Baghdad (1966- 1970) karena ia kecewa pada level pengajaran di Universitas Al-Azhar tersebut hingga ia banyak menghabiskan waktunya untuk membaca di perpustakaan dan di warung kopi sambil berpartisipasi dalam diskusi intelektual, debat politik dan budaya, khususnya tentang baik buruknya sosialisme dan nasionalisme Arab. Dan di Universitas Bagdad ia menemukan pendidikan yang lebih sekular dan bergaya Barat. Pada masa ini, ia menjadi yakin bahwa Islam harus ditafsirkan ulang. Walaupun ujian S.2 telah ditempuh, meninggalnya professor penasihatnya membuat penulisan tesisnya tertunda. Karena itu, ia pergi ke Eropa untuk studi lanjut, dia menghabiskan waktunya mulai pertengahan 1970-1971 untuk berkeliling Eropa dan belajar Bahasa Perancis, Inggris dan Jerman (Elposito, 2002)

Sekembalinya ke Indonesia Gusdur bergabung di Fakultas Ushuluddin Universitas Hasyim Asy' Ari, dan menjadi dekan hingga tahun 1974. Pada tahun 1970-an, ia menekuni dunia tulis menulis dan menjadi kolumnis tetap di majalah Tempo, Kompas, Pelita, dan Jurnal Prisma. Sebelum menjabat ketua PB NU 1984, Gusdur menjabat ketua Dewan Kesenian Jakarta (DKJ). Tahun 1989 dan 1994 berturut-turut terpilih sebagai Ketua Umum PB NU hingga menjadi Presiden RI keempat Oktober 1999.

Pokok-Pokok Pemikiran KH. Abdurrahman Wahid

1. Hubungan Islam dan Negara

Hubungan Islam dan Negara (Wahid, 2001), merupakan suatu bidang kajian yang sangat penting sebagai gejala sosial. Hubungan tersebut merupakan cermin agama Islam dalam masyarakat. Hubungan Islam dan Negara dalam penjelasan Gusdur dikatakan bahwa:

Islam tidak mengenal doktrin tentang negara. Dalam soal bentuk negara, menurutnya tidak mempunyai aturan baku. Hal ini bergantung negara bersangkutan apakah mau menggunakan model demokrasi, teokrasi atau monarki. Hal yang terpenting bagi Gusdur adalah terpenuhinya tiga kreteria, yaitu: *pertama*, mengedepankan prinsip-prinsip permusyawaratan. *Kedua*, ditegaskan keadilan. *Ketiga*, adanya jaminan kebebasan (*al-huriyyah*) (Ma'mun, 1999).

Dalam pembukaan UUD 1945 terdapat doktrin tentang keadilan dan kemakmuran. Tak ada pula doktrin bahwa negara harus berbentuk formalisme negara Islam, demikian pula dalam pelaksanaan hal-hal kenegaraan. Negara dalam perspektif Gusdur adalah *al-Hukum* (hukum atau aturan) (Ma'mun, 1999). Islam tidak mengenal konsep pemerintahan yang defenitif sehingga etik kemasyarakatanlah yang diperlukan. Dalam persoalan mendasar misalnya Islam tidak konsisten, terkadang memakai *Istikhlaf*, *Bay'ah*, ataupun *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi*, padahal suksesi adalah soal yang cukup urgen dalam masalah kenegaraan. Apa yang menjadi keinginan Gusdur untuk tidak memformalkan Islam sebagai ideologi dan acuan dalam negara sejalan dengan keinginan sebahagian besar warga negara yang mayoritas Islam. Hal ini terbukti dalam pemilu 1999 yang dimenangkan oleh partai nasionalis termasuk PAN dan PKB yang sedikit religius.

Penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara yang dimotori oleh Gusdur dan KH. Amad Siddiq, paling tidak karena dua hal yaitu; Pertama, Islam adalah agama Fitriah. Sepanjang suatu nilai tidak bertentangan dengan keyakinan Islam, ia dapat diarahkan agar selaras dengan tujuan-tujuan dalam Islam. ketika Islam diterima oleh masyarakat, ia tidak harus mengganti nilai-nilai yang terdapat di dalamnya tetapi bersikap menyempurnakan. Di sinilah letak pertentangan Gusdur secara pribadi dengan sebahagian *person* ICMI sebagai sebuah lembaga (Elposito, 2002). Dalam perspektif *Ahlu al-Sunnah Wa-al-Jamaah* aliran yang diyakini Gusdur- pemerintah diilik dan dinilai dari segi fungsionalnya, bukan dari normal formal eksistensinya, negara Islam atau bukan. Selama kaum muslimin dapat menyelenggarakan kehidupan beragama mereka secara penuh, maka konteks pemerintahannya tidak lagi menjadi pusat perhatiannya.

Kedua Islam dan Pancasila dinilai mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan Islam dan wawasan ke agamaan negara Indonesia sudah dijamin.

Gusdur dengan penuh keyakinan menjelaskan pemerintah yang berideologi pancasila harus dipertahankan, karena syaria'ah dalam bentuk hukum agama, fikhi atau etika masyarakat masih dilaksanakan oleh kaum muslimin di dalamnya sekalipun hal itu tidak diikuti dengan legislasi dalam bentuk undang-undang negara. Bila etik kemasyarakatan Islam dijalankan, tak ada alasan selain mempertahankannya sebagai kewajiban agama. Dari sanalah munculnya keharusan untuk taat kepada pemerintah (Dedy, 1998).

Gusdur berusaha memberikan sinergi untuk memparalelkan hubungan negara dan agama. Dalam pemikirannya, ia melihat besarnya hambatan dalam proses pembangunan yang diakibatkan oleh kesalahpahaman yang sangat besar antara pihak penanggungjawab ideologi negara-negara yang sedang berkembang (Wahid, 1999). Upaya Gusdur ini tidak lepas dari perang bapaknya sebagai perumus konsep kenegaraan dan ia berpendapat bahwa tidak ada pertentangan antara Islam dan nasionalisme. Islam bisa berkembang secara spritual dalam sebuah negara nasional yang tidak secara formal berdasarkan pada Islam. Gusdur menjelaskan lebih lanjut sebagaimana yang dikutip Douglas E. Ramage sebagai berikut:

NU berpegang kepada konsepsi nasionalisme yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. NU telah menjadi pioner dalam masalah ideologis. Ini tentu hanya satu kasus, karena di seluruh dunia Islam hubungan antara nasionalisme dan Islam masih menjadi persoalan. Negara-negara Arab menganggap nasionalisme sebagai bentuk sekularisme. Mereka belum mengerti bahwa nasionalisme seperti yang dipraktekkan di Indonesia tidaklah sekuler, tetapi sangat menghormati perang agama. ¹⁴

Pemikiran Gusdur ini mendapat sambutan yang hangat dari berbagai lapisan termasuk non muslim dan mereka ini sangat antusias terhadap sikap inklusif Gusdur. Keyakinan keagamaan di Indonesia patut menjadi teladan karena satu sisi sistem politik yang netral secara agama dan pancasila adalah sebuah ekspresi dari negara yang sekuler secara politik tetapi memberi peluang berkembangnya agama.

Hal ini yang tidak disetujui ICMI. Imaduddin Abdurrahim salah seorang tokoh ICMI tidak mempercayai kalau nasionalisme bisa menjadi pemersatu bangsa. Keyakinan tokoh ini, Islam bisa berfungsi sebagai basis moral bagi negara, jika Islam kepercayaan sembilan puluh persen rakyat Indonesia berbeda dengan itu, Gusdur malah dengan tegas mengatakan tanpa pancasila, kita akan berhenti sebagai negara (Remage, 1997).

Pemikiran Gusdur yang kontra dengan ICMI bukan berarti Gusdur anti Islam. Persoalannya adalah awal berangkat antara Gusdur dengan ICMI itu beda. ICMI oleh sebagian anggotanya lebih menonjolkan bendera Islam dalam kekuatan politik yang kemudian disusupkan dalam institusi politik yang ada sementara NU lebih akomodatif, dalam arti selama kehidupan beragama diberi haknya selama itupula menjadi kewajiban untuk mempertahankannya.

2. *Pluralisme*

Pluralisme adalah sebuah paham yang mengakui dan mempercayai adanya perbedaan dalam masyarakat yang meliputi perbedaan agama, ras, kelompok, suku budaya, dan adat istiadat. Dalam membicarakan pluralisme, Gusdur tak jarang menghubungkannya dengan agama, karena agama inilah yang sering dimanfaatkan oleh mayoritas dalam menindas dan menekam secara diam-diam kaum minoritas. Pandangan Gusdur terhadap pluralisme tercermin pada sikapnya yang membela minoritas dan non muslim dan melakukan kerjasama dengan siapa saja secara terbuka, baik dengan kelompok kristen, hindu, budha, maupun kelompok Islam yang lain. Contoh ketika pemimpin tabloid Monitor Arswendo Atmowiloto menempatkan nabi Muhammad Saw. pada urutan ke 11 di antara tokoh dunia. Umat Islam secara spontan bereaksi dan meminta agar kantor tabloid di tutup dan dilarang beroperasi lalu Gusdur mengatakan: "Saya tidak setuju dengan itu. Bawalah ke pengadilan itulah penyelesaian yang terbaik". Gusdur memberikan pelajaran kepada rakyat untuk menghargai otoritas Pengadilan dan tidak bertindak menghakimi sendiri.

Gusdur menurut Frans Magnis Suseno adalah seorang yang menghayati agama Islam secara sangat terbuka. Ia sosok pribadi yang bebas dari segala kepicikan, primordialistik dan sektarian. Ia jelas seratus persen seorang yang beragama Islam tetapi keislamannya begitu mantap sehingga ia merasa tidak terancam oleh pluralitas (Suzeno, 2000).

Kelompok minoritas lain yang sering dibela Gusdur adalah penganut Konghucu, kendati negara

tidak mengakui keberadaan negara ini khususnya pada masa orde baru tapi Gusdur tetap membelahnya sebagai hak pribadi terhadap suatu keyakinan tentang kebenaran ajaran yang dianut. Pembelaan dan pengakuannya terhadap hak minoritas ini merupakan wujud nyata dari tanggung jawab sosial kebangsaan dan praktek demokrasi. Hal ini pulalah yang mendasari diakuinya kemudian Konghucu sebagai agama dalam pemerintahan Gusdur.

Gagasan Gusdur mengenai toleransi dan dialog antar agama atau antar iman tersingkronisasi dalam pemikirannya mengenai pluralisme. Apabila seseorang berpikir positif tentang pluralisme, maka otomatis di dalamnya sudah ada unsur-unsur yang menunjukkan sikap toleran dalam keberbedaan. Th. Sumartana, seorang penganut Katolik menilai bahwa Gusdur melihat perbedaan agama-agama cenderung merupakan perbedaan yang berada dalam tataran kemanusiaan dan tetap yakin bahwa sesungguhnya yang menjadi hakim untuk mengatakan seorang masuk surga atau neraka adalah Tuhan (Sumartana, 2000). Bahkan ia mengatakan informasi dan ekspresi diri yang dianggap merugikan Islam sebenarnya tidak perlu dilayani. Cukup di imbangi dengan informasi dan ekspresi diri yang positif konstruktif (Wahid, 1999).

Sikap pluralis Gusdur yang tampak lebih mementingkan kelompok minoritas tak jarang mendapat tuduhan dan hujatan yang bertubi-tubi, bahkan ia dituduh sekuler dan penghianat umat, padahal sikap Gusdur yang demikian justru ingin memfungsionalisasikan ajaran Islam secara maksimal. Agama tidak sekedar simbol, dan menawarkan janji ke akhirat-an sementara realitas kehidupan yang ada dibiarkan tidak tersentu. Sikap Gusdur tidak pernah memperlihatkan kebenciannya pada kaum minoritas menyebabkan pula bisa bergaul siapa saja.

Menurut penulis Gusdur menginginkan pendewasaan diri dalam pandangan beragama dan melakukan hal-hal yang konstruktif, pemekaran cakrawala umat, pembinaan kembali akhlak umat hingga mencapai keseimbangan optimal antara emosi dan rasio.

3. *Demokratisasi*

Jauh sebelum menjadi presiden, Gusdur²⁰ telah melemparkan gagasan dan pemikirannya tentang demokrasi yang pantas diterapkan di negeri ini. Dalam konteks keindonesiaan, Gusdur memandang demokrasi sebagai suatu proses atau budaya yang terus menerus dan tidak hanya diukur dari segi kelembagaannya saja seperti yang diterapkan selama orde baru. Gusdur menjelaskan:

Ya..kan mereka sudah ngomong sudah ada demokrasi dengan mengatakan sudah ada lembaganya. Ada MPR, ada DPR. Ya, semacam itulah. Namun saya sendiri beranggapan, demokrasi itu harus utuh, tidak hanya lembaga tetapi juga perilaku orang-orangnya juga harus demokratis. Nyatanya perilaku kita tidak demokratis (Gusdur, 1998).

Ungkapan Gusdur di atas sebagai perlawanan terhadap rezim orde baru yang selalu mengklaim dirinya bersikap demokratis, padahal menciptakan UU untuk menjerat siapa saja yang menkritik. Hampir tidak ada orang yang berani mengemukakan kebenaran. Kalaupun ada, ujung-ujungnya adalah korban, sebutlah misalnya Sri Bintang Pemungkas, AM. Fatwa bahkan anggota DPR- MPR sendiri selama 32 tahun, ke hadirannya hanya setuju, setujuuuuuuuuuuu!. Menegakkan demokrasi menurut Gusdur tidak bisa menghindari omongan yang tidak enak bahkan kontroversi menurutnya adalah esensi demokrasi (Gusdur, 1998).

Dalam negara yang demokratis, harus pula diikuti oleh warga masyarakat yang demokratis. Masyarakat demokratis menurut Gusdur adalah semua warga negara mempunyai kedudukannya yang sama di muka hukum. Kedua, kebebasan berpendapat dibuka seluas-luasnya, keempat adanya pemisahan yang tegas dalam fungsi yang tidak boleh saling mempengaruhi antara eksekutif, legislatif dan yudikatif (Gusdur, 1998). Dalam menegakkan demokrasi Gusdur sangat menghindari terjadinya kekerasan, dan beliau lebih percaya pada perjuangan kultural.

4. *Pribumisasi*

Istilah "Pribumisasi Islam" pertama kali dilontarkan tahun 1980-an oleh Abdurrahman Wahid sebagai ganti atas istilah *indigenization* dalam bahasa Inggris. Pribumisasi Islam lahir dalam konteks perhatian Gusdur untuk tidak menjadikan Islam sebagai alternatif terhadap persoalan-persoalan kenegaraan dan kebangsaan. Ini berbeda dengan sebahagian komunitas gerakan Islam pemurnian, para pencari "Islam asli dan otentik", di Indonesia menghendaki pengislaman negara. Atau mengangkat ajaran Islam sebagai alternatif untuk mengatasi persoalan-persoalan kebangsaan. Seperti tampak dalam tuntutan penegakan syariat Islam dan Piagam Jakarta. Dengan pribumisasi, segenap ajaran agama yang telah diserap oleh kultur lokal akan tetap dipertahankan dalam bingkai lokalitas

tersebut. Singkatnya seperti dikatakan Gusdur sendiri, mengokohkan kembali akar budaya kita, dengan tetap berusaha menciptakan masyarakat yang taat beragama. Pada level bahasa, ia tidak setuju dengan pergantian sejumlah kosakata dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Arab, seperti ulang tahun diganti dengan *milad*, selamat pagi diganti dengan *Assalamu Alaikum*, teman atau sahabat dengan *ikhwan* proses ini disebut Islamisasi dan Arabisasi (Baso, 2002). Maka tidak heran kalau kemudian muncul kontroversi diakhir 1980-an tentang *Assalamu Alaikum* diganti dengan Selamat Pagi.

SIMPULAN

1. K.H. Abd Rahman Wahid adalah sosok intelektual dan cendekiawan muslim yang inovatif latar belakang keilmuannya yang beragam dalam dunia Islam ia bukan tradisional konservatif, bukan pula modernis Islam melainkan dia seorang pemikir liberal dan seorang pemimpin NU berbasis tradisi terbesar.
2. Menurut K.H. Abd Rahman Wahid hubungan antara Islam dan negara, tidak ada pertentangan, negara tidak musti diformalkan dengan label Islam. Ini didasarkan pada adanya jaminan untuk berjalan beriringan dalam sebuah negara kesatuan yang berideologikan Pancasila, tetapi di sisi lain memberikan kebebasan untuk menjalankan agama dan kepercayaan di bawah lindungan negara dan konstitusi. Sedangkan pluralisme menurutnya adalah salah satu potensi untuk membangun demokrasi yang memberikan peluang kepada semua ragam untuk berkompetisi di dalam mendapatkan hak yang sama di depan hukum, sehingga tidak ada warga merasa di nomor duakan. Sedangkan gagasannya tentang pribumisasinya adalah bukan berarti menghilangkan nilai-nilai Islami dalam masyarakat, tetapi bagaimana nilai-nilai itu sejalan dengan kultur lokal. Dan yang terpenting adalah suptansinya bukan lebelitasnya (simbolik).

REFERENSI

- Al-Brebesy, Ma'mun Murod. *Menyingkap Pemikiran politik Gusdur dan Amin Rais tentang Negara*. Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Baso, Ahmad. *Pelesetan Lokalitas*. Cet. I; Jakarta Disantara, 2002.
- Esposito Jhon L. dan Jhon O. Voll. *Makers of Contemporary Islam*, diterjemahkan oleh Sugen Harianto, at. al, *Tokoh Kunci Gerakan Islam Kontemporer*. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Garafido Persada, 2002.
- Malik Dedy Djamaluddin. dan Idy Subandi Ibrahim. *Zaman Baru Islam Indonesia*. Cet. I; Bandung: Mizan, 1998.
- Ngatawi, Al-Zastrow. *Gusdur Siapasih Sampeyan*. Cet. II; Jakarta: PT Glora Aksara Pratama, 1999.
- Remage, Douglas E. *Demokratisasi, Toleransi Agama dan Pancasila: Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid*, dalam Greg Fealy dan Greg barton, *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*. Cet. I; Yogyakarta: LKiS, 1997.
- Remage, Douglas E. *Demokratisasi, toleransi agama dan Pancasila; pemikiran politik Abdurrahman Wahid*, dalam Greg Fealy dan Greg Barton, *Tradisionalisme Radikal; Persinggungan Nahdatul Ulama-Negara*. Cet. I; Yogyakarta: LKiS, 1997.
- Suzeno, Frans Magnis. *Pembawa Bangsa Pasca Tradisional*, dalam INCRES, *Beyond The Symbols Jejak antropologis Pemikiran dan Gerakan Gusdur*. Cet. I; Bandung; Remaja Rosda Karya, 2000.
- Th. Sumartana. *Penebar Pluralisme dalam INCRES, Beyond the Symbols Jejak Antropologis Pemikiran dan Gerakan Gusdur*. Cet. I; Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Wahid, Abdurrahman. *Tuhan tidak Perlu Dibela*. Cet. I; Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Wahid, Abdurrahman. *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*. Cet. II; Jakarta: Desantara, 2001
- Wahid, Abdurrahman . *Prisma Pemikiran Gusdur*. Cet. I; Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Wahid, Abdurrahman. *Prisma Pemikiran Gusdur*. Cet. I; Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Wawancara Wartawan Forum dengan Gusdur dengan judul "Negeri ini kaya dengan calon Presiden" dalam Tabayun Gusdur. Cet. I; Yogyakarta: LKiS; 1998.
- Wawancara wartawan Matra dengan Gusdur dengan judul "Saya nomor tiga tentang suksesi NU, ICMI dan Pak Harto" dalam *tabayun GusDur* (Cet. I; Yoqyakata: LKiS, 1998) h. 46.